

BAB II

GAMBARAN UMUM

1.1 Gambaran Umum Papua

1.1.1 Kondisi Geografis dan Penduduk

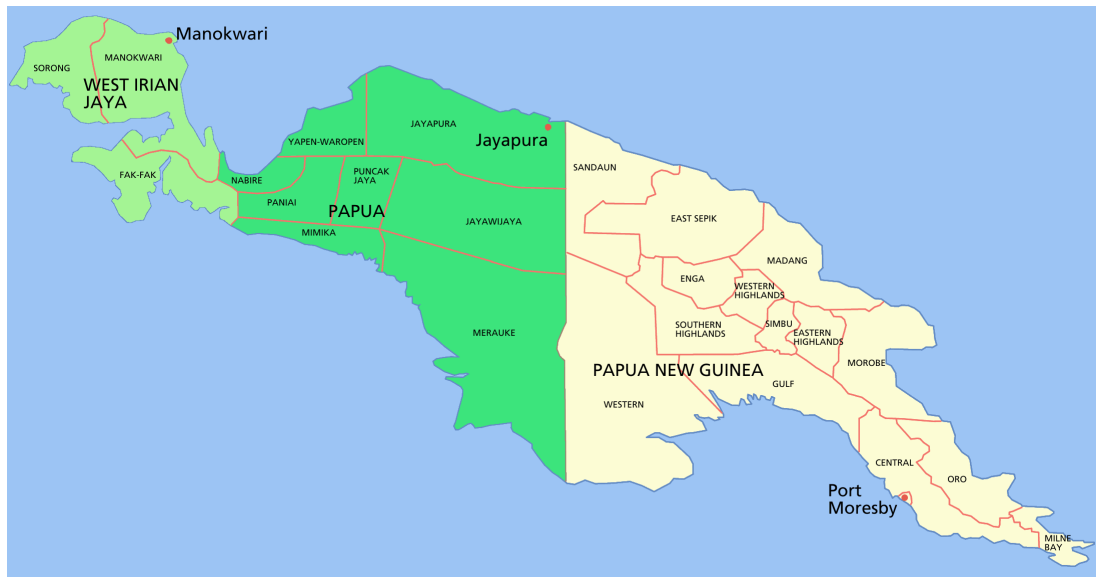
Papua adalah daerah yang terbesar dan paling timur dari Indonesia, yang terdiri dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Berbatasan dengan negara Papua Nugini di timur, Provinsi Maluku Utara dan Maluku di barat, Samudra Pasifik di utara, dan Laut Arafura di selatan. Menurut sensus 2010 oleh Statistik Indonesia, Papua memiliki populasi 2.833.381, dan berpenduduk 760.422 di Papua Barat, mayoritas dari mereka pula memeluk agama Kristen (terutama Protestan).¹ Provinsi Papua dibagi menjadi dua puluh delapan kabupaten dan satu kota sedangkan Papua Barat terdiri dari dua belas kabupaten dan satu kota yang mana kota terbesarnya adalah Jayapura.

Istilah 'Papua' pertama kali muncul dalam kamus Melayu yang dibuat oleh William Marsden pada tahun 1812. Sollewijn Gelpke, seorang pejabat kolonial Belanda melakukan penelitian tentang asal usul kata 'Papua'. Dalam arsip Portugis dan Spanyol, kata 'Papua' adalah istilah untuk penduduk yang mendiami Kepulauan Raja Ampat dan wilayah pesisir Semenanjung Kepala Burung. Menurut FC Kamma, seorang misionaris yang juga seorang ahli bahasa, 'sup-i-papwah' berasal dari bahasa Biak yang berarti 'tanah di bawah matahari terbenam'. Saat itu,

¹ Populasi penduduk Indonesia tahun 2012 berdasarkan provinsi, <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/penduduk-indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-dan-2010.html>. Di akses 5 November 2018

penduduk Pulau Biak saat cuaca cerah bisa melihat sebuah pulau besar yang terletak di barat, pulau di bawah matahari terbenam.²

Gambar 2.1
Peta Provinsi Papua dan Papua Barat



Sumber: *Google Maps*

Selama era kolonial Belanda, wilayah itu dikenal sebagai bagian dari Dutch New Guinea. Pada tahun 1969, daerah ini berubah nama menjadi Irian Barat, nama Irian yang diusulkan oleh seorang pejuang Papua, Frans Kaisiepo memiliki arti 'sinar yang menghalau kabut di laut'. Hingga tahun 1973 Irian Barat berganti nama menjadi Irian Jaya oleh Pemerintahan Suharto melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya. Kemudian perubahan Irian Jaya kembali menggunakan nama Papua lagi ditetapkan oleh Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) setelah lahir dan berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua pada tahun 2003. Saat ini, penduduk asli provinsi

² Suroto, Hari. "Asal Usul Nama Papua", <https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20171114164628-445-255587/asal-usul-nama-papua/>. Di akses pada 21 November 2018 .

ini lebih suka perubahan nama menjadi Papua karena menjadi sebuah kebanggaan Orang Papua kembali ke jati diri yang selama ini hilang.

2.1.2 Latar Belakang Sejarah Konflik Papua

Konflik di Papua selama ini bukanlah persoalan baru di Indonesia, baik konflik dalam spektrum kekerasan, maupun konflik yang terkait dengan gerakan-gerakan kesukuan. Kalau dihubungkan dengan isu-isu separatisme, pemekaran, dan otonomi khusus (Otsus), dimensi politik sangat mewarnai konflik di Papua. Belum lagi dimensi selain politik apabila dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM, diskriminasi, dan eksploitasi sumber daya alam Papua. Rangkaian fenomena konflik yang terjadi di Papua apabila dibuatkan rangkuman berdasarkan kejadian penting (*milestone*) yang terjadi selama ini adalah sebagai berikut.

Era administrasi sementara PBB (1962-1969)

- 15 Agustus 1962: Perjanjian New York oleh Kerajaan Belanda, Republik Indonesia dan PBB. Wilayah Irian Barat diserahkan oleh Kerajaan Belanda pada administrasi Otoritas Eksekutif Sementara PBB, diikuti dengan pertempuran sporadis antara milisi / tentara pro-Indonesia dan pro-Belanda hingga 1969.
- 1966 - 1967: pengeboman udara Pegunungan Arfak
- Januari - Maret 1967: pengeboman udara wilayah Ayamaru dan Teminabuan
- 1967: Operasi Tumpas, 1.500 diduga tewas di Ayamaru, Teminabuan dan Inanuatan.
- April 1969: pengeboman udara Danau Wissel (daerah Paniai dan Enarotali); 14.000 selamat melarikan diri ke hutan.

Era Orde Baru

Periode 1969 – 1980

- Juli -Agustus 1969: Penentuan Pendapat Rakyat menentukan bahwa wilayah Irian Barat adalah wilayah kedaulatan Republik Indonesia.
- Juni 1971: Henk de Mari melaporkan 55 pria dari dua desa di Biak Utara tewas. Berita diterbitkan harian Belanda De Telegraaf, Oktober 1974.
- Tanpa sumber: 500 mayat ditemukan di hutan Kecamatan Lereh, barat daya Bandara Sentani, Jayapura.
- 1974: Di Biak Utara, 45 orang tewas.
- 1975: Di Biak, setidaknya 41 orang dari desa Arwam dan Rumbin tewas.
- 1977: pengeboman udara Akimuga (tambang Freeport McMoRan Inc.).
- 1977 - 1978: pengeboman udara Lembah Baliem.
- April 1978: Enam mayat yang tidak dapat diidentifikasi ditemukan di kecamatan Dosai, Jayapura.
- Mei 1978: Lima pemimpin OPM tewas dan 125 penduduk desa ditembak karena dicurigai simpatisan OPM.
- June 1978: 14 mayat korban tembak ditemukan di Barat Bandara Sentani, Jayapura.
- Tanpa sumber valid: Biak Utara, 12 orang tertembak.

Periode 1980 – 1998

- 1981: 10 tewas, 58 menghilang di daerah Paniai.

- Juni - Agustus 1981: Operasi Sapu bersih, populasi Ampas Waris dan desa Batte-Arso menjadi korban.
- September-Desember 1981: 13.000 diduga tewas di dataran tinggi tengah.
- Juli 1984: Angkatan Laut, Udara, dan Darat menyerbu Desa Nagasawa / Ormo Kecil, 200 orang tewas.
- Tanpa sumber: Bombardir dari laut di Taronta, Takar, dan desa pesisir Masi-Masi; yang selamat melarikan diri ke arah Jayapura; pada 1950 dikuasai Belanda dan masing-masing desa berpopulasi 1500-2000.
- 24 Juni 1985: 2.500 tewas di wilayah Kabupaten Paniai, Danau Wissel, termasuk 115 dari desa-desa Iwandoga dan Kugapa.
- 1986 - 1987: 34 tertembak di Paniai / Wissel Lake District.
- 8 Januari 1996: Krisis sandera Mapenduma, militan OPM yang dipimpin Kelly Kwalik menyandera 26 orang di Irian Jaya, memicu Operasi pembebasan sandera Mapenduma (dua sandera tewas) dan Insiden Penembakan Timika 1996 (16 orang tewas).³
- 9 Mei 1996: Krisis sandera Mapenduma, berakhir dengan serbuan Kopassus ke Desa Geselama, di Mimika.

Era Reformasi

Periode 1998 – 2010

- 6 Oktober 2000: polisi merazia upacara pengibaran bendera di Wamena, massa berkumpul dan dua warga non-Papua tewas dalam sebab tidak jelas. Massa

³ Free Papua Movement Action Update, <https://fas.org/irp/world/para/papua.htm>. Di akses pada 18 Januari 2018

memulai kerusuhan ke lingkungan migran dari daerah lain di Indonesia, membakar dan menjarah toko-toko. 7 warga Papua tertembak dan 24 warga non-Papua tewas.⁴

- 11 November 2001: ketua Presidium Dewan Papua, Theys Eluay, ditemukan tewas di mobilnya di luar Jayapura setelah hilang diculik.⁵
- 31 Agustus 2002: pemberontak menyerang sekelompok profesor Amerika. 3 tewas dan 12 lainnya luka-luka. Polisi menduga OPM yang bertanggung jawab.⁶
- 1 Desember 2003: Sekelompok 500 orang mengibarkan bendera separatis, 42 orang ditangkap.
- 15 Oktober 2004: pemberontak menewaskan enam warga sipil dalam serangan di Puncak Jaya.⁷
- 16 Maret 2006: Tiga polisi dan seorang pilot tewas dan 24 orang lainnya cedera dalam bentrokan dengan warga Papua dan mahasiswa yang telah menuntut penutupan tambang Grasberg Freeport di Provinsi Papua.⁸
- Pada tanggal 9 Agustus 2008: Di Wamena, satu orang, Opinus Tabuni (kerabat Buchtar Tabuni), tewas tertembak peluru kepolisian Indonesia yang dipicu pengibaran bendera Bintang Kejora oleh aktivis di sebuah demonstrasi besar yang

⁴ Violence And Political Impasse In Papua, <http://www.hrw.org/reports/2001/papua/PAPUA0701.pdf>. Di akses pada 18 Januari 2018

⁵ Country Reports on Human Rights Practices Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor 2001, <https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2001/eap/8314.htm>. Di akses pada 19 Januari 2019

⁶ Indonesian Military Shoots US Teachers, Blames Attack on Rebel Group, http://www.historycommons.org/entity.jsp?entity=free_papua_movement_1. Di akses pada 20 Januari 2019

⁷ 'Papua separatists' kill six civilians, <https://archive.is/2lr3#selection-357.0-357.39>. Di akses pada 19 Januari 2019

⁸ Sweeping operations by the military and police resulted in a number of Papuans being killed, http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-5336693/LEAD-4-security-personnel-killed.html. Di akses pada 22 Januari 2019

diorganisir oleh DAP (Dewan Adat Papua) dalam Hari Internasional Masyarakat Adat Dunia.⁹

- 4 Desember 2008: 4 warga Papua terluka oleh tembakan dari polisi dalam demonstrasi menuntut kemerdekaan Papua.
- 29 Januari 2009: Sedikitnya 5 orang Papua terluka karena tembakan oleh polisi saat demonstrasi.
- 14 Maret 2009: Satu personel TNI tewas dalam serangan terhadap pos tentara di Tingginambut. OPM diduga bertanggungjawab.
- Pada tanggal 8 April 2009: Beberapa bom meledak di sebuah jembatan dan sebuah kilang di pulau Biak. Satu orang tewas.
- 9 April 2009: Sebuah serangan bom di Jayapura menewaskan 5 orang dan menciderai beberapa orang¹⁰. Sementara itu 500 militan menyerang pos polisi dengan busur dan panah dan bom bensin. Satu orang tewas tertembak polisi.¹¹
- 11-12 April 2009: Pertempuran antara tentara dan militan Papua menewaskan 11 orang termasuk 6 anggota tentara. Pada saat yang sama, sebuah bom dijinakkan di kantor polisi di Biak.
- Pada tanggal 15 April 2009: Sebuah serangan terhadap sebuah konvoi polisi di Tingginambut menewaskan satu orang dan melukai enam. OPM diduga bertanggungjawab.

⁹ The killing of a Papuan at a demonstration remains unpunished, <http://www.humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRC-UAC-152-2009/>. Di akses pada 18 Januari 2019

¹⁰ Police Blame Group For Election attacks, <https://westpapuareview.wordpress.com/2009/04/25/police-blame-group-for-election-attacks/>. Di akses pada 18 Januari 2019

¹¹ Violence In Papua, <https://westpapuareview.wordpress.com/2009/04/11/violence-in-west-papua/>. Di akses pada 20 Januari 2019

- 11 Juli 2009: Seorang karyawan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc warga Indonesia tewas ditembak dalam serangan di luar perusahaan tambang itu di Papua.
- Juli 2009: insiden pengibaran bendera Papua Barat oleh OPM di desa Jugum, kemudian lebih dari 30 rumah dibakar dalam sebuah operasi TNI.¹²
- 12 Agustus 2009: Sebuah konvoi 16 bis karyawan Freeport-McMoRan Copper disergap. Dua orang tewas dan 5 luka-luka.¹³
- Pada tanggal 16 Desember 2009: pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kelly Kwalik tewas ditembak oleh kepolisian Indonesia saat operasi penyerbuan di Timika.

Periode 2010-an

- 24 Januari 2010: Pemberontak menyergap sebuah konvoi karyawan perusahaan tambang PT Freeport McMoran. 9 orang terluka, OPM menyangkal bertanggung Jawab.¹⁴
- 1 Maret 2010: Asosiasi Papua Barat Australia di Sydney mengatakan bahwa situasi di Papua Barat memburuk. Sejak Juli tahun lalu telah terjadi 14 insiden penembakan di sekitar tambang Grasberg, tambang emas dan tembaga milik

¹² Police and soldiers burn houses and destroy resources in Papua's Bolakme district, <http://www.humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRC-UAC-143-2009/>. Di akses pada 18 Januari 2019

¹³ Une insurrection oubliée en Papouasie indonésienne, <http://pourconvaincre.blogspot.com/2009/08/une-insurrection-oubliee-en-papouasie.html>. Di akses pada 22 Januari 2019

¹⁴ OPM Denies Responsibility For Ambush And Calls Police Accusation Baseless, <http://thejakartaglobe.com/news/opm-denies-responsibility-for-ambush-and-calls-police-accusation-baseless/355047>. Di akses pada 22 Januari 2019

Freeport, dan serangan ini telah menewaskan sedikitnya 3 dan melukai 13 orang.¹⁵

- 23 Maret 2010: Pemberontak menyerang sebuah konvoi tentara Indonesia. melukai beberapa tentara.¹⁶
- Mei 2010: OPM diduga menewaskan 3 pekerja di sebuah lokasi konstruksi, memicu sebuah operasi militer oleh TNI yang menyerbu sebuah desa, 2 tewas dan seorang wanita diperkosa sementara rumah di 3 desa dibakar oleh militer.¹⁷
- 17 Mei 2010: TNI menyerang markas militan OPM, menewaskan satu tersangka militan.¹⁸
- 21 Mei 2010: Militan menyerang anggota TNI di dekat Yambi, 75 km dari Mulia. Tidak ada korban.¹⁹
- 15 Juni 2010: Seorang perwira polisi Indonesia tewas tertembak saat patroli, 8 senjata api dicuri oleh pemberontak.²⁰
- 23 Juni 2011: Seorang perwira polisi dari Jayapura ditembak oleh anggota yang diduga dari OPM.²¹
- Juli 2010: 12 rumah dan dua gereja rusak dan seorang wanita diperkosa saat operasi TNI untuk menangkap Goliath Tabuni.²²

¹⁵ AWPAs Calls Rudd To Raise West Papua With Indonesia, <http://pacific.scoop.co.nz/2010/03/awpa-calls-rudd-to-raise-west-papua-with-indonesia/> Di akses pada 12 Februari 2019

¹⁶ West Papua Report on April 2010, http://www.freewestpapua.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1170&Itemid=2. Di akses pada 18 Januari 2019

¹⁷ West Papua Report on June 2010, <http://www.etan.org/issues/wpapua/2010/1006wpap.htm>. Di akses pada 18 Januari 2019

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² West papua Report on July 2010, <http://www.etan.org/issues/wpapua/2010/1007wpap.htm>. Di akses pada 18 Januari 2019

- 6 Juli 2011: Tiga tentara ditembak saat bentrokan dengan penyerang tak dikenal di Desa Kalome, Tingginambut.²³
- 20 Juli 2011: Seorang perwira TNI tewas dalam penyergapan terhadap pasukan keamanan di distrik Puncak Jaya di Papua oleh pemberontak.²⁴
- 31 Juli 2011: Pemberontak menyerang sebuah mobil di Papua dengan senjata, kapak dan pisau menewaskan seorang tentara dan tiga warga sipil dan melukai tujuh orang, OPM menyangkal bertanggung jawab.²⁵²⁶
- 1 Agustus 2011: Polri menyatakan bahwa anggota OPM menewaskan empat warga sipil di dekat Tanjakan Gunung Merah, Paniai.
- 2 Agustus 2011: Seorang personel TNI yang menjaga sebuah pos militer di Tingginambut tewas tertembak. Di kota Mulia dua penembakan terhadap target polisi dan militer melukai seorang tentara.
- 3 Agustus 2011: Pemberontak menembak sebuah helikopter militer saat mengevakuasi tubuh seorang prajurit yang diduga juga dibunuh oleh mereka.
- 22 Oktober 2011: Al Jazeera menerbitkan rekaman dari sebuah pertemuan kemerdekaan yang diserang oleh pasukan keamanan Indonesia. Setidaknya lima orang tewas.²⁷

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ "Un soldat et trois civils tués dans une attaque en Indonésie - Actualité Asie", http://www.chine-informations.com/actualite/asie/un-soldat-et-trois-civils-tues-dans-une-attaque-en-indonesie_7917.html. Di akses pada 20 Januari 2019

²⁷ West Papua Report on November 2011, <http://etan.org/issues/wpapua/2011/1111wpap.htm>. Di akses pada 18 Januari 2019

- 2 Desember 2011: Seorang perwira kepolisian Jayapura ditemukan tewas di samping sungai pada hari Kamis setelah ia diduga dibunuh oleh kelompok orang yang bersenjata panah dan belati. OPM diduga bertanggung jawab.²⁸
- 5 Desember 2011: Dua perwira kepolisian tewas di Puncak Jaya selama tembak-menembak dengan tersangka anggota OPM.
- 12 Desember 2011: kepolisian menyergap markas grup lokal OPM. Polisi menyita senjata api, amunisi, pisau, perlengkapan perang, dokumen, bendera Bintang Kejora dan menewaskan 14 militan.
- Juni 2012, Koordinator Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni meninggal di rumah sakit setelah mengalami luka tembak dalam operasi penangkapan oleh kepolisian Jayapura.
- 22 Februari 2013, sebuah helikopter TNI rusak akibat tembakan dari darat ketika mencoba untuk mengevakuasi mayat personel yang tewas melawan OPM sebelumnya. Setidaknya 3 anggota kru terluka. 8 personel TNI tewas dalam tembak-menembak sebelumnya.

Konflik Papua yang bersifat multi-dimensi—sejak 1963 hingga saat ini—masih sulit dikelola oleh Pemerintah Pusat dengan pola kebijakan ataupun pendekatan kepada permasalahan yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan dampak dari dimensi politik, sosial budaya, ekonomi, dan keamanan, dimana antara satu dimensi selalu terkait dengan dimensi lainnya. Luasnya wilayah dan beratnya medan perjalanan transportasi menjadi penentu lain dalam menjalin komunikasi

²⁸ Police Officer Killed in Papua, <http://news.asiaone.com/News/Latest%2BNews/Asia/Story/A1Story20111202-313999.html>. Di akses pada 18 Januari 2019

antar daerah dengan daerah lain. Dan apabila dijabarkan sumber konflik di Papua adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sumber Konflik di Papua

Persoalan	Konteks
Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya institusi dan system politik tidak ada “kemerdekaan” atau independensi system peradilan. • Tidak ada kebebasan Pers dan kemandirian masyarakat madani. • Korupsi • Lemahnya partai politik • Tidak ada partisipasi masyarakat, ketidakseimbangan gender di dalam proses pemerintahan dan politik. • Tidak sempurnanya proses pemilihan. • Eksploitasi politik terhadap perbedaan-perbedaan etnik dan agama. • Lemahnya upaya pengembangan system penanganan konflik. • Lemah dan tidak ada koordinasi di tingkat nasional dan internasional. • Destabilisasi peran politik karena persebaran penduduk yang tidak merata. • Lembaga-lembaga politik di Papua tidak berfungsi secara efektif karena “pengaruh” Pemerintah Pusat dan perebutan sumberdaya politik di Papua, terutama dalam masalah implementasi Otsus dan pemekaran provinsi, yaitu status pemekaran Irjabar dalam skema Otsus Papua.
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan kapasitas ekonomi karena masalah kemiskinan, pengangguran, inflasi dan terbatasnya akses ketahanan pangan untuk kesejahteraan nasional. • Melebarnya disparitas ekonomi berdasarkan pengelompokan etnik. • Instabilitas ekonomi makro. • Perubahan pada destabilisasi eksternal, bentuk-bentuk investasi atau destabilisasi kebijakan ekonomi internasional. • Peningkatan kompetisi terhadap kepemilikan sumber-sumber ekonomi. • Pertumbuhan pasar gelap. • Perkembangan “perang” ekonomi. • Eksploitasi kekayaan SDA Papua terus berlangsung, terutama di bidang pertambangan dan kehutanan. Selain mengakibatkan kerusakan alam yang masif dan sulit

	diperbaiki, kondisi ini semakin membuat masyarakat menjadi kelompok marjinal ditanah mereka sendiri, meskipun perlu diakui bahwa masyarakat Papua belum mampu mengelola SDA secara tepat dan professional karena dominasi tradisi meramu.
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Larangan sosial. • Warisan konflik etnik yang tidak terselesaikan. • Tidak adanya organisasi lintas budaya antar elemen masyarakat madani. • Ketegangan Bahasa, agama dan etnisitas. • Kegagalan mekanisme penyelesaian pertikaian/penurunan legitimasi otoritas adat. • Selain eksploitasi ekonomi/SDA Papua, menurut masyarakat Papua tradisi budaya tidak mendapat tempat sejajar dengan budaya daerah lain di Indonesia. Eksploitasi dan diskriminasi tidak dalam konteks rasial, melainkan juga terhadap produk budaya masyarakat Papua, seperti hasil-hasil kerajinan tangan.
Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya kapasitas kekuatan-kekuatan pengamanan dan sulit dikontrol. • Pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan. • Kehadiran non-state military actors • Pengawasan daerah perbatasan yang lemah. • Ketidakstabilan kawasan, misalnya karena perubahan politik di negara tetangga. • Warisan konflik bersenjata masa lalu. • Peningkatan jumlah dan peredaran senjata-senjata ringan. • Keamanan sebagai sumber konflik di Papua dikaitkan dengan kapasitas/kekuatan TNI & Polisi/Brimob sebagai aktor negara berhadapan dengan penduduk lokal. Kekuatan yang besar justru menimbulkan ketidakamanan, karena banyaknya pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh para anggota TNI dan Polri.

Sumber: Papua Road Map, Kapila (2002), h. 12

2.2 Pelaku dan Peran Dalam Konflik Papua

Pengelompokan aktor pelaku yang pernah terlibat dalam konflik di Papua dibagi ke dalam empat kelompok utama²⁹, yaitu: individu, kelompok, negara dan non-negara. Adapun

²⁹ Elisabeth, Adirana. 2004. *Pemetaan Peran & Kepentingan Para Aktor Dalam Konflik Papua*. Jakarta Pusat: Puslit. Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI. Hlm. 70-74

aspek keterlibatan baik individu, komunitas, pers media, lembaga formal dan informal diluar kategori itu merupakan bentuk keterkaitan lainnya yang saling bersangkutan. Apabila aktor-aktor yang pernah terlibat dijabarkan akan menjadi seperti berikut ini.

2.2.1 Aktor Individu

1. Theys H. Eluay (alm.), Ketua Presidium Dewan Papua (PDP)
2. Thomas Wanggai (alm.), Presiden Melanesia Merdeka
3. Tom Beanal, Wakil Ketua PDP, Ketua Umum Dewan Adat Papua (DAP), Komisaris PT. Freeport Indonesia
4. Willy Mandowen, Anggota PDP, Konsultan LEMASA, Konsultan PT. Freeport Indonesia
5. Thaha Al Hamid, Sekjen PDP
6. Pdt. Herman Awom, Pemuka agama dan Moderator PDP
7. Yorris Th. Raweyai, Anggota PDP, dan Ketua Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Perantauan di Jakarta
8. Pdt. Sofyan Yoman, MA., Ketua Gereja Baptis Papua
9. Arnold Ap (alm.), Kurator Museum Uncen dan Seniman
10. Seth Rumkorem, Pemimpin TPN/OPM di luar negeri (?)
11. Jacob Prai, Pemka
12. Benni Wenda, Pimpinan DEMMAK
13. Kelly Kwalik, Pimpinan TPN/OPM
14. Tadius Yogi, Pimpinan TPN/OPM
15. Richard Hans Yoweni, Pimpinan TPN/OPM
16. Goliath Tabuni, Pimpinan TPN/OPM

17. Philipus Karma, PNS Pemda Provinsi Papua dan Pemimpin berbagai pengibaran bendera Bintang Kejora
18. Leo Imbiri, Sekjen DAP
19. Fadhal Al Hamid, Sekjen Pemerintahan Adat Papua (PAP)
20. John Rumbiak, Pendiri ELSHAM Papua
21. Aloysius Renwarin, Pjs. Direktur ELSAM Papua
22. Latifah Anum Siregar, Ketua Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), tokoh Solidaritas Perempuan Papua (SPP)
23. Pieter Ell, Ketua KontraS Papua
24. Yusan Yeblo, Ketua Kelompok Kerja Wanita (KKW)
25. Beatrix Koibur Rombino, mantan Ketua SPP
26. Yosepha Alomang, Pendiri Yayasan Hak Asasi Manusia dan Anti Kekerasan (YAHAMAK) dan penerima Goldman Award
27. Hendropriyono, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)
28. Dick Asmuruf, Mantan Sekda Provinsi Papua
29. Jimmy Idjie, Ketua Irian Jaya Crisis Centre, Aktivis PDIP, Anggota DPRD I Irian Jaya Barat 2004-2009
30. Abraham Ataruri, Pjs. Gubernur Irian Jaya Barat
31. Andreas Anggaibak, mantan Bintara Polisi, mantan Ketua DPRD II Mimika 1999-2004, dan deklarator Irian Jaya Tengah
32. John Piet Wanane, Bupati Sorong 2000-2004
33. Robert Kardinal, Anggota DPR RI (Golkar)
34. Karel Phil Erari, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI)

35. Patrice Simon Marin, Anggota DPR RI (Golkar)
36. Leo Laba Ladjar, Uskup Agung Keuskupan Jayapura
37. Theo van den Broek, Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura
38. Presiden RI: Sukarno, Suharto, B.J Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Sukarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo
39. Ir. Wenan Watori, MSi., Anggota DPRD Papua 2004-2009
40. Jendral Ryamizard Ryacudu, KASAD
41. Mayjen Nurdin Zainal, Pangdam Trikora
42. Tamsul, Ketua KKSS
43. Pengusaha Lokal, Dalam dan Luar Negeri
44. Pemred Cendrawasih Pos, Papua Pos, Timika Pos, dll.

2.2.2 Aktor Kelompok, Organisasi, Komunitas dan LSM Dalam Negeri dan Lokal

1. Tentara Pembebasan Nasional (TPN)/Organisasi Papua Merdeka (OPM)
2. Presidium Dewan Papua
3. Dewan Adat Papua
4. Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA)
5. Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka (DEMMAK)
6. Solidaritas Nasional Mahasiswa Papua (SONAMAPA)
7. Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya (FORERI)
8. Satuan Tugas (Satgas) Papua
9. Partai Rakyat Demokratik (PRD) Papua

10. Kelompok Milisi Nasionalis Pro-Jakarta; Satgas Merah Putih, Barisan Pembela Merah Putih, Laskar Jihad
11. Irian Jaya Crisis Center (salah satu kelompok pendukung utama pembentukan Provinsi baru Irian Jaya Barat)
12. Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS)
13. Gereja Katolik Papua (Keuskupan Agung Jayapura, Timika, Merauke dan Sorong)
14. Gereja Kristen Indonesia (GKI)
15. ELSHAM Papua
16. Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP)
17. KontraS Papua
18. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jayapura
19. Solidaritas Perempuan Papua
20. Kelompok Kerja Wanita (KKW) Papua
21. Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Rakyat Papua (GempaR Papua)
22. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)
23. Front Nasional Mahasiswa Papua (FNMP)

2.2.3 Aktor Kelompok, Organisasi, Komunitas dan LSM Internasional

1. Dewan Perdagangan Australia
2. Yayasan Konservasi Australia
3. Dewan Pelayanan Sosial Australia

4. Asosiasi Konsumen Australia
5. International Catholic Migration Commission (ICMC)
6. Catholic Relief Fund
7. Catholic Relief Service
8. World Vision Australia
9. International Committee of the Red Cross
10. Papua Resource Center
11. Global Corruption Report
12. Open Society Institute
13. World Wild Fund (WWF)
14. Search for Common Ground
15. International Center for Transitional Justice
16. Center for International Forestry Research
17. Peace Bridge International (PBI)
18. Friedrich Ebert Stiftung (FES)
19. Australian People for Health, Education and Development Aboard (APHEDA)
20. Australian West Papua Association (AWPA)
21. Extractive Industry Transparency Initiative (EITI)
22. Global Initiative
23. International Crisis Group (ICG)

2.2.4 Instansi Pemerintah dan Unsur-unsur Pemerintah (Pusat dan Daerah)

1. Departemen Dalam Negeri

2. Departemen Polkam (Sekarang Polhumkam)
3. Departemen Luar Negeri
4. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. Departemen Pendidikan
6. Departemen Kesehatan
7. Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)
8. Badan Intelejen Negara (BIN)
9. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD)
10. Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS)
11. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
12. Brigade Mobile (Brimob) Polda Papua
13. Dinas-dinas di Pemda Provinsi Papua
14. Komando Daerah Militer (Kodam) Trikora
15. Kepolisian Daerah (Polda) Papua
16. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
17. Gubernur Papua
18. DPRD Papua dan Papua Barat
19. Partai-partai politik di Papua

2.2.5 Aktor Negara

1. Indonesia
2. Papua Nugini
3. Amerika Serikat (AS)

4. Belanda
5. Jerman
6. Inggris
7. Australia
8. Jepang
9. Korea Selatan
10. Cina
11. Negara-negara Pasifik Selatan

2.2.6 Aktor Non-Negara

1. World Bank
2. Asian Development Bank (ADB)
3. International Financial Institution (IFI)
4. Consultative Group on Indonesia (CGI)
5. International Monetary Fund (IMF)
6. Hong Kong Shanghai Banking Corporation (HSBC)
7. ABN AMRO
8. Citigroup
9. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
10. United Nations (PBB)
11. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
12. World Health Organisation (WHO)

13. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
14. United Nations Development Assistance Framework (UNDAF)
15. United Nations Development Programme (UNDP)
16. United Nations Children's Fund (UNICEF)
17. United Nations Environment Programme (UNEP)
18. United Nations Population Fund
19. United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)
20. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO)

2.2.7 Transnational/Multinational Corporations (T/MNCs)

1. PT. Freeport Indonesia
2. Overseas Private Investment Corporation (OPIC)
3. British Petroleum (BP) MIGAS
4. Global Mining Initiatives
5. Voluntary Land Rights *trust* Fund
6. INPEX Corporation (Indonesia Australia Offshore Project)
7. Japan Petroleum Exploration Co. (JAPEX)
8. Marubeni Sagindo
9. Conoco Philippines
10. Total Fina Elf

Varian lainnya adalah hasil temuan dan analisis peneliti LIPI dalam pemetaan aktor dengan pendekatan politik di dalam konflik Papua. Pemetaan aktor yang dilakukan bukan hanya melihat pihak-pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam konflik Papua, akan tetapi juga

dipersempit bersama melihat keterkaitan dengan sumber konflik sebenarnya. Dalam variasi ini juga menjelaskan hubungan kepentingan antar pihak dengan wacana yang dijadikan tajuk.

Pemetaan ini terurai di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Aktor, Wacana, dan Kepentingan dalam Konflik Papua

Aktor Konflik Papua	Wacana	Kepentingan	Sumber Konflik
Depdagri/BIN TNI/Polri, Menkopolhukkam, dan Kantor Wapres. Pemda/DPRP	Nasionalisme Indonesia dan keutuhan NKRI Otonomi Khusus Papua dan pembangunan	Kontrol terhadap sumberdaya- sumberdaya di Papua Repapuanisasi	Sejarah integrasi, status politik, dan identitas politik Kegagalan pembangunan dan inkonsistensi Otsus
Organisasi Papua Merdeka	Nasionalisme Papua	Kemerdekaan Papua	Sejarah integrasi, status politik, dan identitas politik
Presidium Dewan Papua	Status politik Papua, pengakuan terhadap kemerdekaan Papua 1 Desember 1961	Kemerdekaan Papua	Sejarah integrasi Status politik, dan identitas politik Kekerasan politik dan pelanggaran HAM
Dewan Adat Papua	Perlindungan hak- hak dasar rakyat Papua, pelurusan sejarah, dan identitas Papua	Pemerintah adat Papua	Sejarah integrasi, status politik, dan identitas politik Kegagalan pembangunan
Gereja	Papua sebagai zona damai	Perdamaian di tanah Papua	Kekerasan politik dan pelanggaran HAM
LSM	HAM, gender, dan good governance	Demokratisasi di tanah Papua	Kekerasan politik dan pelanggaran HAM Inkonsistensi Otsus Kegagalan pembangunan
Ketua-Ketua Suku	Pemberdayaan masyarakat adat dan kesejahteraan	Perlindungan suku-suku di Papua	Kegagalan pembangunan

Sumber: Diolah oleh penulis dari hasil penelitian Tim Kajian Papua LIPI (2004,2005, dan 2006)

2.3 Pemetaan Aktor Pelaku, Peranan dan Kepentingan Dalam Konflik Papua

Dalam ranah politik, pelaku-pelaku yang terlibat dalam konflik Papua dapat diidentifikasi berdasar kepentingan-kepentingan politiknya dalam kaitan dinamika perjuangan di Papua. Hasil penelitian LIPI (2004) mengklasifikasikan menjadi tiga bagian kelompok-kelompok berdasarkan kepentingannya³⁰, yakni kelompok pro-kemerdekaan (MS=Merah Sekali),³¹ kelompok pro-NKRI (BS=Biru Sekali),³² dan kelompok tengah (dikategorikan lagi dengan varian Merah Muda, Biru Muda, atau Merah Biru).³³ Kelebihan dari kategorisasi pelaku konflik dalam oposisi biner karena terdapat pihak-pihak yang diletakkan dalam wilayah 'abu-abu' yakni antara pro-kemerdekaan dan pro-NKRI.

Berdasar pada pemetaan yang dilakukan oleh peneliti LIPI yang dituangkan kedalam manifesto Papua Road Mapnya, pemetaan mengalami beberapa perubahan dan perkembangan dalam mengklasifikasi aktor-aktor yang terlibat, Hal ini karena analisis terhadap para aktor konflik dikategorikan berdasar tiga hal³⁴, yaitu peran (*role*), waktu (*period*), dan wilayah (*area*) yang terus menjalar; sedangkan keterlibatan para pelaku ditentukan oleh lima faktor, yaitu kepentingan, hubungan, kapasitas, agenda perdamaian dan insentif juga selalu berkembang. Maka berlandaskan pada analisis tersebut hasil skema pemetaannya adalah sebagai berikut.

³⁰ Sebelumnya pernah dilakukan oleh Mabes TNI dengan membuat pemetaan aktor-aktor dalam konflik Papua menjadi empat kelompok, yakni Matoi Merah, Matoi Merah Muda, Matoi Biru Muda, Matoi Biru. Kemudian dikembangkan ulang oleh Tim Peneliti LIPI berdasarkan klasifikasi secara komprehensif.

³¹ Kubu ini pada awalnya terdiri atas OPM, TPN (Tentara Pembebasan Nasional), DEMMAK (Dewan Musyawara Masyarakat Koteka), PDP (Presidium Dewan Papua), Panel Papua, Satgas Papua, dan beberapa kelompok internasional pro-kemerdekaan.

³² Barisan ini pada awalnya terdiri dari TNI, Polri, Milisi lokal pro-NKRI, Milisi Laskar Jihad Papua, dan KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan).

³³ Kelompok ini mencakup LSM dan organisasi-organisasi sosial antara lain sebagai berikut: ALDP (Aliansi Demokrasi untuk Papua), LBH, YALI (Yayasan Lingkungan), KontraS, SPP (Solidaritas Perempuan Papua), DAP (Dewan Adat Papua), Kepala-Kepala Suku, Gereja Katolik, Gereja Protestan, Media Massa, dan Mahasiswa.

³⁴ Adriana Elisabeth. *Konflik Poso, Pemetaan dan Pencarian Pola-Pola Alternatif Penyelesaiannya*, Jakarta: LIPI. Hlm. 25

Bagan 2.1
Pemetaan Aktor dalam Dinamika Konflik Papua



Sumber: Papua Road Map

Dalam kategorisasi ini menunjukkan bahwa gradasi antara kelompok yang berbeda kutub sangat kontras yang mana dinilai idealis dan bulat dalam bersikap pada satu sisi, dan pada sisi lain, kelompok yang dikategorikan tengah cenderung memiliki standar ganda dan lebih dinamis dalam memihak karena berbagai sebab. Meskipun banyak aktor, kelompok dan organisasi yang terlibat namun tidak semuanya bergerak secara konsisten dan kontinu hingga saat karya ilmiah ini ditulis. Oleh karenanya penulis akan mengkasifikasikan mereka yang dinilai punya pengaruh luas dan dampak besar berdasarkan fenomena yang ada terhadap dinamika konflik yang selama ini terjadi di Papua. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai karakteristik masing-masing aktor dalam konflik Papua merujuk pada hasil klasifikasi diatas akan didefinisikan menjadi Faksi Pro Kemerdekaan, Pro NKRI dan Kelompok Tengah.

2.3.1 Faksi Pro Kemerdekaan

2.3.1.1 Organisasi Papua Merdeka (OPM)

OPM berdiri tahun 1965, terfragmentasi dalam berbagai kelompok gerilya dan organisasi kecil serta tidak memiliki system komando yang terpusat dan memiliki persenjataan yang cukup sebagaimana Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Adapun dasar pengorganisasian otonom, masih secara dominan berafiliasi atau dipengaruhi oleh identitas kesukuan masing-masing anggota atau pemimpinnya. Pemimpin OPM yang populer adalah Kelly Kwalik dari Suku Amungme. Kivimaki dan Thorning (2004) mengatakan bahwa peranan OPM dilihat berbeda-beda oleh orang yang berbeda-beda. Bagi nasionalis Papua, OPM secara historis sinonim dengan perjuangan kemerdekaan.

Menurut Bliveer Singh (2008:144-145), sesudah jatuhnya rezim politik Orde Baru, perjuangan OPM adalah melakukan respons perjuangan ini dengan mencoba membentuk “National Coalition” dan “United Fronts”, yang salah satunya adalah pembentukan National Liberation Council (NLC) dipimpin oleh Amos Indey, Toto, dan Rumkoren. Dewan ini mengorganisir organisasi-organisasi massa yang sudah berdiri pada tahun 1960-an seperti Semangat Angkatan Muda Papua Anti-Republik Indonesia (SAMPARI), Operasi Organisasi Papua Merdeka (OOPM), dan Gerakan Nasional Papua (GNP). Pada Juni 2003, atas inisiatif Tom Beanal dan John Otto Ondawame, pertemuan pemimpin-pemimpin Papua Barat diselenggarakan di Nieuwegein, Utrecht, Netherlands untuk melakukan rekonsiliasi antara pejuang-pejuang Papua (Singh 2004:144). Pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan di Lae, Papua New Guinea pada 28 November hingga 1 Desember 2005 yang menghasilkan berdirinya WPNCL (West Papua National Coalition for Liberation) yang bermarkas di Port Villa. Dewan ini juga memiliki sayap militer yang terpisah dari OPM yakni West Papua National Liberation Armed Forces yang diketuai oleh Mathias Wenda (singh 2004:147).

2.3.1.2 Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka (DEMMAK)

Berdiri pada tahun 1998 yang merupakan kelompok kesukuan dimana sebagian besarnya diisi oleh suku Dani, kelompok suku terbesar di Papua. Pemimpin di tingkat bernama Benny Wenda yang berasal dari Dani Barat, sedangkan pendiri dan pemimpin internasionalnya adalah Sam Karoba. Dari pernyataan politiknya, lembaga ini cukup frontal dan keras dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua. DEMMAK secara praktis tidak berfungsi pasca ketuanya, Benny Wenda ditangkap dan lalu melarikan diri ke Inggris dimana ia diberikan suaka politik oleh sekelompok LSM Eropa. Meskipun Pemerintah Indonesia telah memberikan Red Notice dan surat perintah penangkapan internasional kepadanya, namun eksistensi DEMMAK masih diperhitungkan hingga saat ini mengingat banyaknya anggota dan pendukung organisasi ini melebur dan bergabung dengan koalisi masyarakat sipil untuk HAM, baik ditataran lokal hingga tataran global.

2.3.1.3 Presidium Dewan Papua (PDP)

PDP adalah lembaga politik pro-kemerdekaan yang dibentuk melalui Kongres Rakyat Papua kedua di Jayapura pada Mei-Juni 2000. Sebagai lembaga masyarakat Papua ditingkat provinsi, PDP merupakan satu-satunya lembaga yang secara informal memiliki legitimasi politik, sosial, dan budaya secara luas dari masyarakat Papua. PDP adalah organisasi pertama yang dikenal jauh lebih moderat ketimbang faksi pro kemerdekaan lainnya di Papua. PDP secara struktur organisasi, membawahi panel Papua yang dibentuk disemua kabupaten dan diharapkan mewadahi aspirasi politik pro-kemerdekaan. Agenda utama PDP adalah meluruskan sejarah integrasi Papua dan memperjuangkan kemerdekaan Papua secara damai. Namun setelah tiga tahun berdiri, PDP lebih banyak menghadapi kekerasan-kekerasan politik dan belum

menunjukkan strategi politik yang jelas dalam menjalankan dua agenda politiknya yang utama. Lembaga ini pernah diketuai oleh (alm) Theys Eluay yang pernah menjadi fraksi Golkar DPRD Papua. Setelah terbunuhnya Theys, gerakan politik PDP menjadi lemah dan tidak signifikan dalam perjuangan rakyat Papua. Pergerakan PDP dewasa ini dalam praktik-praktik politik, hanya sebatas membangun wacana politik di media lokal yang dilakukan oleh Sekjen PDP, Thaha M. Alhamid.

2.3.1.4 Panel Papua

Panel Papua adalah lembaga akar rumput dibawah naungan PDP pada tingkat kabupaten. Hampir semua kabupaten di Provinsi Papua memiliki badan Panel Papua. Saat Kongres Papua II tahun 2000 dilaksanakan, Panel Papua memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk Presidium Dewan Papua. Panel Papua terdiri dari kepala suku, pemimpin dan para tokoh pemuda dari berbagai kelompok, serta pemimpin agama setempat. Secara umum aspirasi politik Panel Papua memperjuangkan kemerdekaan Papua, namun secara damai. Kepemimpinan Panel Papua di masing-masing kabupaten didominasi oleh kalangan terdidik lokal seperti pendeta, petugas gereja dan guru. Meskipun bersepakat dalam aspirasi politiknya untuk pro-kemerdekaan secara damai, tidak adanya garis komando dan instruksi yang jelas membuat Panel Papua disetiap perwakilan kabupatennya memiliki credo masing-masing dalam pergerakannya. Terbukti dengan adanya aktivis yang melibatkan diri dalam aksi pengibaran bendera atau demonstrasi lainnya. Dilain tempat, para aktivis Panel Papua sebagian sudah beralih ke partai politik dan ikut dalam pemilihan umum. Tak banyak pula yang aktif kembali ke gereja dan organisasi keagamaan, dan sebagian lainnya bahkan menjadi pendukung Otonomi Khusus.

2.3.1.5 Satgas Papua

Satgas Papua merupakan kelompok milisi yang dibentuk oleh pemuda-pemuda Papua dibawa pimpinan Boy Eluay (putra Theys Eluay) dalam kongres Papua pada tahun 2000. Kelompok ini dibentuk menurut inisiatif spontan para pemuda guna melindungi pemimpin Papua dari gangguan ataupun serangan. Kelompok ini juga berperan besar dalam menjaga setiap kegiatan acara yang melibatkan massa yang besar di Papua. Kelompok ini dalam perkembangannya sering terlibat dengan sejumlah kekerasan, pemerasan dan aksi vandalisme terhadap pendatang, tak pula terlibat perkelahian dengan kelompok lain, sehingga keberadaannya meresahkan warga. Meskipun telah dinyatakan bubar oleh Polda Papua, namun keberadaannya tetap eksis dan selalu dikembangkan penelusurannya oleh Polda Papua.

2.3.1.6 ULMWP dan Kelompok Internasional pro-Kemerdekaan

Kelompok internasional pro-kemerdekaan Papua berawal dari ketika diaspora Papua telah dimulai pada tahun 1962, dimana ketika beberapa negara yang tergabung kedalam komunitas internasional memberikan tempat bagi para pengungsi yang ingin meninggalkan Irian pada masa transisi dibawah United Nations Temporary Executive Administration (UNTEA). Pada Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, banyak aktivis yang memperjuangkan kemerdekaan secara berkelompok melakukan eksodus dan mengungsi untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua dengan harapan suatu saat mereka akan kembali dengan mendapatkan pengakuan dari komunitas internasional. Aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di luar negeri melakukan lobi-lobi politik ke negara-negara di Afrika, Karibia, Amerika Selatan, Eropa

dan negara-negara sosialis untuk memperoleh pengakuan terhadap Pemerintahan Revolusioner Papua Barat yang diroklamasikan pada 1 Juli 1971.

Beda halnya dengan organisasi-organisasi pro-kemerdekaan dalam ranah domestik, yang terfragmentasi di setiap faksinya dan memiliki sekat yang tak jarang banyak diantara mereka (baik diantara aktor maupun institusinya) mengalami disorientasi dari tujuan utamanya. Kelompok Internasional diaspora justru lebih solid dinamis dalam koordinasinya dan memiliki jaringan yang luas dalam kancah politik global. Kelompok internasional juga mampu diterima oleh komunitas internasional karena mampu menggunakan metode *civil resistance* sebagai simbol perlawanan mereka. Pergerakan diplomatis yang menggunakan perlawanan sipil tanpa senjata mampu memberikan kesan bahwa kelompok progresif ini berbeda dengan kelompok konvensional pro-kemerdekaan Papua yang ada di tanah papua sendiri yang cenderung represif dan melakukan teror.

Kendala terberat yang dialami oleh kelompok internasional adalah tidak adanya panji pemersatu gerakan yang menjadi medium dalam pergerakan mereka diluar Indonesia. Tepat pada 7 Desember 2014, pertemuan bersejarah para pemimpin Papua Barat di Vanuatu menyaksikan berbagai faksi gerakan kemerdekaan bersatu untuk membentuk sebuah badan baru yang disebut Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP).

ULMWP menyatukan tiga organisasi utama yang telah lama berjuang untuk kemerdekaan dengan caranya sendiri, termasuk Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Koalisi Nasional untuk Pembebasan (WPNCL) dan Parlemen Nasional Papua Barat (PNWP). Komite Eksekutif yang terdiri dari enam anggota terpilih dari berbagai kelompok mengoordinasikan kegiatan ULMWP, didukung oleh Komite Dewan (sebelumnya dikenal sebagai Komite Dewan) terdiri dari tiga anggota terpilih. Komite Dewan membantu memimpin struktur ULMWP. Setelah

KTT tiga tahunan di 2017, ULMWP merestrukturisasi dan memilih Benny Wenda sebagai Ketua dan Jacob Rumbiak sebagai Juru Bicara.

2.3.2 Faksi Pro NKRI

2.3.2.1 Pranata Pemerintah

Institusi-institusi Pemerintah yang dimaksud disini adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh kementerian dan lembaga pemerintah non departemen. Lembaga yang memiliki pengaruh dalam konflik Papua ini, antara lain: Departemen Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukkam), Departemen Luar Negeri, Badan Intelejen Negara (BIN), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan lain-lain.³⁵ Namun TNI adalah satu-satunya representasi politik negara pada masa Orde Baru. Bersama-sama Polri, TNI dianggap sebagai institusi negara yang harus bertanggung jawab dalam kekerasan-kekerasan politik dan pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua baik pada masa Orde Lama, Orde Baru dan reformasi.

International Crisis Group (Maret 2006) mengatakan bahwa representasi Pemerintah Pusat pada masa Pemerintahan Megawati ialah Departemen Dalam Negeri (Mendagri Hari Sabarno) dan BIN (Mayjend Hendroprijono). Menurut ICG, militer tetap menjadi pemain politik paling penting dalam kontestasi politik lokal di Papua. Pada masa Pemerintahan SBY, Kantor Wapres memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian konflik Papua. Misalnya institusi ini menginisiasi dialog antar pimpinan Pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Papua

³⁵ Dan lainnya disini merupakan lembaga yang tidak berperan secara langsung atas konflik yang terjadi dalam dimensi politik, namun turut terkait karena bagian dari elemen NKRI, seperti Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), partai-partai politik, DPR RI, dan DPR Papua

Leaders Forum.³⁶ Sebagai catatan, masing-masing institusi negara ini juga memiliki kepentingan yang berbeda-beda di Tanah Papua. Namun, mereka dipersatukan oleh satu wacana yang sama yaitu mempertahankan NKRI. Praktik-praktik aktor ini antara lain adalah menyusun perangkat peraturan perundang-undangan untuk Provinsi Papua, mengerahkan operasi militer dan keamanan di Papua, dan menyelenggarakan administrasi birokrasi.

2.3.2.2 Tentara Nasional Indonesia

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, gerakan demokratis dan sipil yang tumbuh mengganti peran militer dalam keterlibatan politik di Indonesia. Sebagai hasilnya, TNI pada masa ini telah mengalami reformasi tertentu, seperti penghapusan Dwifungsi ABRI yang mana memiliki fungsi dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara dan memegang kekuasaan dan mengatur negara secara otokratis. Reformasi ini selain membuat supremasi sipil, juga jadi melibatkan penegak hukum dalam masyarakat sipil umum dalam TNI menjalankan tugasnya. Jargon terkininya, “Bersama rakyat TNI kuat” juga memberikan dampak moral bagi sipil dan meninggalkan kesan *human right friendly*.

TNI (yang dahulunya ABRI) memiliki tugas sebagai alat negara di bidang pertahanan yang menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, termasuk dalam menjaga ketertiban sipil, integritas dan teritori negara. TNI khususnya Angkatan Darat memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah konflik di Papua. Operasi militer yang digelar untuk memerangi OPM ataupun yang terindikasi OPM sejak integrasi Papua kedalam Republik Indonesia pada awal 1960-an hingga sekarang ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan politik di Papua. Operasi militer yang digelar kala itu memiliki dimensi

³⁶ Disampaikan oleh Djohermansyah Johan (Deputi Politik, Setwapres RI) di LIPI Jakarta pada 5 September 2008

yang sangat luas baik dalam kaitannya dengan integritas NKRI maupun dengan eksploitasi sumber daya alam, pelanggaran hak asasi manusia, dan demokratisasi di Papua. Beberapa unit yang harus disebut dalam kaitannya dengan TNI di Papua adalah Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad)

2.3.2.3 Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Meskipun sejak April 1999 fungsi serta anggaran militer dan kepolisian dipisahkan, Polri tidak kehilangan tempat dan peran di Papua. Justru di era Otonomi Daerah (Otod) anggaran tambahan dan kewajiban teknis lainnya ditingkatkan. Dengan direkrutnya lebih banyak orang Papua asli menambah peran kerjasama dan mendapatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat setempat. Secara umum hubungan kepolisian dengan masyarakat lebih baik dibandingkan dengan TNI AD terutama pada saat I Made Mangku Pastika menjadi Kapolda Papua. Satuan didalam tubuh kepolisian yang berperan besar dalam dinamika politik di Papua adalah Brigade Mobil (Brimob) dan struktur wilayah yang turut berperan adalah Kepolisian Daerah (Polda) yang membawahi Kepolisian Resor pada wilayah kabupaten dan kota, lalu Kepolisian Sektor pada tingkat kecamatan.

2.3.2.4 Milisi-Milisi Pro-NKRI

Milisi Satgas Merah Putih dan Milisi Laskar Jihad merupakan dua diantara milisi-milisi pro-NKRI yang dapat diidentifikasi sebagai kelompok dengan adanya pengakuan dari masyarakat sipil Papua. Milisi Satgas Merah Putih atau juga dapat dikenal sebagai Barisan Merah Putih merupakan kelompok milisi nasionalis yang terkenal di Papua. Diklaim jumlah

anggota dan keberadaannya timbul tenggelam dalam konflik politik di Papua.³⁷ Di Wamena, Fakfak, dan Jayapura kelompok ini dikatakan kuat dan besar pendukungnya. Kelompok ini merupakan gabungan dari enam kelompok pejuang pembebasan Irian Barat dan bertujuan untuk menyatukan seluruh organisasi pejuang pembebasan Irian Barat. Pemimpinnya, Ramses Ohee, adalah seorang Ondoafi berasal dari Heram-Waena, Jayapura dan juga merupakan veteran pejuang saat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

Kelompok ini juga berperan aktif dalam politik lokal di Papua dan menjadi berafiliasi dengan satuan-satuan di dalam struktur teritorial militer setempat. Salah satu bentuk ‘kemitraan’ itu adalah keterlibatan mereka pada November 2011 dalam melaporkan aktivitas-aktivitas kelompok Operasi Papua Merdeka (OPM) di Umpagalo. Perkampungan tersebut kemudian diserang oleh sejumlah anggota dari Batalyon Infantri 756/Winame Sili (WMS) yang mengakibatkan 12 orang menjadi korban kekerasan.³⁸

2.3.2.5 Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua

Layaknya Presidium Dewan Papua dan Dewan Adat Papua, LMA Papua hadir sebagai lini terdepan dalam menjaga kelestarian adat asli Papua dan sebagai wadah pengelola dan penerus aspirasi masyarakat asli Papua baik tingkat Pusat maupun Daerah. Gerakan perdamaian yang diusung di Papua pun sejalan dengan PDP maupun DAP sebagai aspirasi politiknya. LMA memiliki tujuan agar mampu bersinergis dengan program pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memajukan masyarakat asli Papua dalam wadah NKRI.³⁹ LMA dalam

³⁷ Mewaspada Keberadaan Milisi di Papua, <http://www.imparsial.org/publikasi/opini/mewaspada-keberadaan-milisi-di-papua/>. Di akses pada 29 Januari 2019

³⁸ *Ibid.*

³⁹ LMA Provinsi Papua, <http://lmaprovinsipapua.blogspot.com/2011/05/lma-provinsi-papua.html>. Di akses pada 29 Januari 2019

kegiatannya memposisikan dirinya sebagai lembaga mitra Pemerintah yang profesional, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala kepentingan kelompok dan golongan.

2.3.3 Kelompok Tengah: Merah Muda (MM) dan Biru Muda (BM)

2.3.3.1 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Masa awal reformasi LSM cenderung memiliki ruang yang luas dalam bergerak mengekspresikan gagasannya. Runtuhnya Orde Baru juga banyak menyisakan persoalan utama atas pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua yang membuat LSM penggiat HAM terpanggil. Salah satu LSM yang penting dalam Konflik Papua adalah ELSHAM (Lembaga Studi Hak-Hak Asasi Manusia) Papua yang dipimpin oleh John Rumbiak. ELSHAM konsisten selama 12 tahun dalam monitoring dan investigasi terhadap kasus-kasus HAM yang terjadi di Papua, memberikan pendidikan dalam pencegahan konflik, melakukan kampanye atas demokratisasi di tanah Papua.⁴⁰

Kemudian ada Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP) yang didirikan pada tahun 1999, berbasiskan di Jayapura dan dipimpin oleh Latifah Anum Siregar yang serta mendapatkan penghargaan dari Colombia University-University of San Diego sebagai Woman Peace Maker pada tahun 2007. LBH Papua dibawah payung YLBHI pula hadir memberikan perhatian khusus terhadap bantuan hukum dan memperjuangkan hak rakyat miskin, buta hukum dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Selain itu, kehadiran KontraS

⁴⁰ Halaman Resmi ELSHAM Papua, <http://elshampapua.org/tentang-kami/>. Di akses pada 29 Januari 2019

Papua, yang notabeneanya adalah sebuah gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah LSM seperti LPHAM, ELSAM, CPSM, PIPHAM, AJI dan organisasi mahasiswa PMII juga berperan aktif dalam melakukan advokasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. Beberapa LSM di Papua yang bergerak dalam isu-isu pemberdayaan rakyat Papua bergabung dalam payung Forum Kerjasama LSM se-Papua (Foker LSM) yang dipimpin oleh Septer Manufandu. Pada tingkat nasional, juga terdapat LSM-LSM yang aktif mengangkat isu Papua seperti ELSAM (Lembaga Studi Hak Asasi Manusia), PBHI (Pusat Bantuan Hukum Indonesia), Kelompok Kerja Papua, dan Imparsial.

Adapun LSM yang berkecimpung dalam konflik Papua diluar korban kekerasan HAM yaitu Yayasan Lingkungan Hidup (YALI) Papua yang memiliki fokus dalam mengadvokasi eksploitasi SDA dan pengrusakan lingkungan. Kemudian organisasi pejuang feminis di Papua hadir Solidaritas Perempuan Papua (SPP), Kelompok Kerja Wanita (KKW), Mitra Perempuan dan Pusat Pendidikan dan Pembinaan Wanita (P3W).

2.3.3.1 Gerakan Kaum Muda Papua

Gerakan kaum muda Papua dimulai kala reformasi 1998 menjadi proses politik yang membuka ruang politik diseluruh Indonesia, memberi ruang demokrasi untuk menuntut keadilan di Tanah Papua. Aksi-aksi demokratis dengan mobilisasi massa menuju pusat-pusat kekuasaan lokal mulai merebak di berbagai kota yang melibatkan aktor-aktor kaum sipil seperti gereja, mahasiswa, pemuda, organisasi adat, dan LSM. Kekuatan sipil yang selama ini terkekang dan dibungkam secara represif, muncul ke permukaan secara sporadis karena momentum. Hal ini menandai semangat gerakan politik di Papua untuk tuntutan kesetaraan, referendum atau kemerdekaan dimulai.

Konflik Papua setelahnya dalam riset LIPI diklasifikasikan menjadi dua jenis gerakan kemerdekaan, yakni Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menggunakan perang gerilya dan kelompok urban yang menggunakan wacana damai.⁴¹ Meskipun berbeda dalam perjuangannya, namun memiliki orientasi yang sama. Menguatnya peran kaum muda Papua karena antitesis kaum urban yang tidak mampu mengolah momentum dan kepercayaan yang diberikan perwakilan rakyat Papua teradapnya, dalam kasus ini adalah peranan PDP yang kurang progresif. Generasi awal kaum muda Papua hadir dari mahasiswa yang progresif mengusung identitas baru, yaitu identitas ke-papua-an dan ingin muncul sebagai aktor baru dalam gerakan kemerdekaan.

Dibanding dengan kelompok konvensional pro-kemerdekaan, seperti OPM atau PDP, atau kelompok internasional pro-kemerdekaan Papua, kelompok perlawanan muda dinilai memiliki kelebihan.⁴² Koordinasi dalam aksinya lebih cepat, terpadu, dinamis dan jangkauannya sangat luas. Koordinasi internasional, nasional, dan regional berlangsung terpadu dan serentak dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, seperti SMS, SNS, dan media internet website dan email yang sangat intensif.⁴³

Gerakan kaum muda dinilai revolusioner karena otonom dari pemimpin Papua dan skeptis terhadap kaum veteran yang sebelumnya pernah berkecipung dalam perjuangan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa kelompok konvensional pro-kemerdekaan sebelumnya pernah menjadi bagian dalam politik Indonesia di masa sebelumnya. Ditambah dengan generasi veteran kolot secara ideologi dan tradisi perjuangan karena ada banyak kasus, saat gerakan kaum muda

⁴¹ Pemetaan Peran dan Kepentingan Para Aktor, Elisabeth 2004

⁴² Wilson. (2017). "Transformasi gerakan kaum muda Papua" In C. Pamungkas & S. R. Rusdiyarti (Eds.), *Updating Papua Road Map*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia & Tim Kajian Papua LIPI.

Papua yang berjuang secara revolusioner mengembangkan perjuangan berbasis gerakan massa diambatkan oleh generasi tua yang mereka sebut sebagai kolaborator freeport.

Kaum veteran yang terfragmentasi juga menjadi landasan gerakan kaum muda Papua untuk mengambil alih peran mereka yang tidak maksimal. Kaum veteran pula secara struktural dinilai memiliki penyakit elitisme-feodal dan patronisme terlihat dari kecenderungan dominasi kepemimpinan tradisional lama, seperti kepala suku ondoafi dan raja. Hubungan partonisme juga nampak dari pengkultusan pimpinan dan senioritas yang harus dianggap sebagai penggerak utama organisasi. Berangkat dari stereotip lama ini, pergerakan kaum muda yang secara notabene adalah kolektif massa dan demokratis sebagai lapisan baru harus mengambil peran lebih dalam perjuangan kemerdekaan Papua.

Transformasi signifikan dalam perjuangan pro-kemerdekaan yang dilakukan oleh kaum muda adalah menggunakan *civil resistance* sebagai simbol perlawanannya. Tidak seperti pergerakan OPM yang konvensional masih menggunakan strategi gerilya dan perlawanan represif, gerakan kaum muda menggunakan perlawanan sipil non-bersenjata dengan melalui protes, mogok, boikot dan simbol perlawanan sosial. Tidak pula seperti PDP yang menggunakan wacana damai dan cenderung lebih kooperatif dengan pemerintah Indonesia, kaum muda pro-NKRI jauh lebih kritis terhadap wacana yang ditawarkan pemerintah Indonesia. Mereka memilih kembali kepada persoalan pokok akar masalah yang terjadi di Papua, yaitu kolonialisme, imperialisme dan militerisme.

2.3.3.2 Dewan Adat Papua

Kalau PDP bergerak dalam wilayah politik, maka DAP bergerak dalam wilayah sosial budaya. Lembaga ini dibentuk untuk menghimpun berbagai pemimpin suku/adat dan

mengutamakan perjuangan pada masalah hak-hak rakyat dan kebudayaan Papua. Perjuangan utama lembaga ini adalah menegakkan hak-hak dasar rakyat Papua yang berkaitan dengan *indigenous and community rights*. Dibentuknya DAP adalah karena pengalaman rakyat Papua yang terkait dengan perusakan hutan, eksploitasi sumber daya alam oleh pihak luar, dan pemiskinan rakyat Papua. Slogan yang diperjuangkan oleh DAP ialah “Rakyat itu kaya, tetapi miskin diatas kekayaannya.”. DAP berjuang agar rakyat Papua mampu berusaha sendiri, menjadi tuan ditanah mereka sendiri, dan menikmati kekayaan alam yang dimilikinya. Ketua DAP pertama kali adalah Tom Beanal dengan dua Sekjend yakni Sekjend DAP, Leo Imbiri dan Sekjend Pemerintahan Adat, Fadhal Alhamid. Perbedaannya dengan PDP adalah jika PDP bergerak dalam aspek-aspek politik perjuangan kemerdekaan Papua, DAP lebih memfokuskan pada aspek-aspek social budaya perlindungan hak-hak masyarakat asli Papua. Sekarang ini, DAP dipimpin oleh Forkorus Yaboisembut. DAP menjadi pelopor dalam demonstrasi pengembalian Otsus ke Pemerintah pada 12 Agustus 2005 dan menjadi panitia dalam peringatan hari bangsa pribumi pada 6 Agustus 2008 yang diwarnai oleh insiden pengibaran bendera bintang kejora.

2.3.3.3 Pemimpin Adat dan Kepala Suku

Kepala suku ialah lembaga tradisional yang mengatur relasi-relasi antar orang Papua dalam suatu suku atau klan tertentu. Kedudukan kepala suku ini menentukan sikap masing-masing suku terhadap permasalahan yang ada. Berkaitan dengan konflik Papua, mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda antara memilih Merdeka atau Otonomi Khusus tergantung dari interpretasi masing-masing kepala suku. Kelompok suku yang dominan di Papua ialah: Biak, Amungme (Timika), Serui (Yapen Waropen), Dani (Wamena), Sentani (Jayapura), Marind

(Merauke), Me (Paniai), Moni (Paniai), Asmats (Agats), Ayamaru (Sorong), dan Kamaro (Timika).

Pelaku-pelaku konflik lainnya yang signifikan dalam konflik separatis adalah perusahaan-perusahaan besar di Tanah Papua. PT Freeport Indonesia (PTFI) adalah anak perusahaan dari Freeport Mc. Moran Cooper & Gold Inc. (FCX) yang melakukan penambangan emas dan tembaga dengan tata cara tambang terbuka di Grasberg dan tambang bawah tanah yang mencakup daerah Timika dan Tembagapura, Papua. Masuknya Freeport Mc. Moran Copper & Gold Inc. ke Indonesia melalui kontrak karya yang ditandatangani oleh Pejabat Presiden RI, Presiden Suharto pada 7 April 1967. Kontrak karya ini mengatur pembagian saham dalam PTFI adalah 81,28% untuk Freeport, 9,36% untuk Pemerintah Indonesia, dan 9,38% untuk PT Indocopper Investama. Pembagian saham tersebut sudah menimbulkan pertanyaan, mengingat bahwa pemerintah hanya mendapat saham yang sangat kecil.

Sejarah masuknya Freeport ke Indonesia diduga terkait dengan sejarah integrasi Papua ke Indonesia. Ditandatanganinya kontrak karya Freeport sebelum Pepera menimbulkan dugaan sebagian elit masyarakat Papua bahwa Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah berkonspirasi menguasai Tanah Papua untuk kepentingan politik dan ekonomi. Sebenarnya kontrak karya ini dipertanyakan keabsahannya oleh masyarakat Papua mengingat bahwa antara 1963 sampai 1969, Papua Barat masih dalam status daerah perselisihan internasional. Hal ini berarti bahwa kontrak karya ini dibuat sebelum dunia internasional mengakui Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia.

Sebagaimana dikatakan oleh Emmy Hafield (2002), merujuk pada perusahaan-perusahaan besar seperti Freeport Mc. Moran di Papua dan Exxon Mobile di Aceh, FDI memberikan kontribusi pada deepening conflict and national disintegration. Hal ini dilacak dari watak eksploitasi

perusahaan ini yang secara paksa meminggirkan penduduk asli dari habitatnya dan menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghadapi penduduk asli di sekitar lokasinya. Militer Indonesia pada masa Orde Baru, berfungsi sebagai the watch dog yang menjamin perusahaan-perusahaan ini dapat beroperasi. Ketika protes masyarakat suku Amungme dan Kamoro terhadap Freeport dihadapi oleh militer Indonesia yang bertanggung jawab terhadap keamanan Freeport Mc. Moran, maka konflik antara masyarakat dan perusahaan secara perlahan-lahan menjadi konflik antara rakyat Papua melawan Pemerintah.

2.3.3.4 Lembaga Keagamaan Gereja

Gereja secara garis besar terdiri atas gereja Katholik dan gereja Protestan. Gereja merupakan lembaga agama yang menyediakan pelayanan rohani, pendidikan, dan pelayanan sosial bagi masyarakat Papua. Papua memiliki empat keuskupan gereja Katholik dan masing-masing memiliki Sekretariat Keadilan dan Perdamaian. Keterlibatan gereja Katholik dalam penegakan HAM dimulai sejak pertengahan tahun 1990-an. YPMD (Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa) dan LBH Jayapura berdiri karena dukungan Gereja Katholik. Sedangkan Gereja Protestan pada masa Orde Baru bersikap moderat secara politik terhadap pemerintah. Hal ini sejak tahun 1998, ketua klasis Gereja Kingmi Timika dan ketua GKI Timika ikut menandatangani laporan HAM Bella-Alama. Sesudah reformasi, Gereja Protestan melibatkan diri secara langsung dalam penegakan HAM namun Gereja Katholik memilih tidak secara langsung. Gereja yang cukup dominan peranannya dalam konflik Papua adalah gereja Katholik, Gereja Kristen Injil di Tanah Papua (GKIT), Gereja Kingmi, dan Gereja Baptis.